
EKSPANSI PERKEBUNAN DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DI SUMATRA TIMUR, 1863-1942

PLANTATION EXPANSION AND POPULATION GROWTH IN EAST SUMATRA, 1863-1942

Devi Itawan

Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Jambi
Jln. Raya Jambi-Ma. Bulian KM. 15, Mendalo Indah, Indonesia
deviitawan2@gmail.com

Diterima tanggal 19 November 2022

Disetujui tanggal 26 Mei 2023

ABSTRACT

This paper aims to examine the population growth issue in East Sumatra during the colonial period, which is closely related to the interests of the plantation industry. The limited historiography of East Sumatra underlies this paper because it interprets population growth as a matter of capitalist plantation production relations. East Sumatra has experienced significant population growth since plantation companies initiated and encouraged migration to meet the need for cheap labor for accumulation. Applying historical methods and a political economy approach, this paper emphasizes that population growth directly implies capitalist plantation production relations. An important conclusion from this study is that changes in the population structure in East Sumatra during the colonial period were closely related to the interests of labor issues of the plantation industry. The forced labor regime under the poenale sanction scheme prompted Chinese labour migration. Furthermore, the poenale sanctie eradication has shifted the labor regime to the free worker promoting the colonization program of Javanese coolies. This shift eventually greatly influenced the structure and composition of the East Sumatra population. It is important to note that this study includes the migration outside the interests of the plantation industry, which was carried out independently by residents in the vicinity who were interested in East Sumatra's economic growth.

Keywords: *colonialism, capitalism, plantation, population, and labor.*

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan membedah proses pertumbuhan penduduk di Sumatra Timur pada masa kolonial yang tidak dapat dilepaskan dari kepentingan industri perkebunan. Tulisan ini dilatarbelakangi terbatasnya historiografi Sumatra Timur yang memaknai pertumbuhan penduduk sebagai persoalan relasi produksi perkebunan kapitalis. Sumatra Timur mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan sejak perusahaan perkebunan menginisiasi dan mendorong migrasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah bagi kepentingan akumulasi. Dengan menggunakan metode sejarah dan pendekatan ekonomi politik, tulisan ini menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk merupakan implikasi langsung dari relasi produksi perkebunan kapitalis. Simpulan penting dari kajian ini adalah bahwa perubahan

dalam struktur kependudukan di Sumatra Timur pada masa kolonial sangat terkait dengan isu tenaga kerja dalam industri perkebunan. Pergeseran dari rezim tenaga kerja paksa dalam skema *poenale sanctie* mendorong penginisiasian impor tenaga kerja Cina. Selanjutnya, ketika *poenale sanctie* dihapuskan, rezim tenaga kerja bergeser menjadi pekerja bebas yang mempromosikan program kolonisasi kuli Jawa. Pergeseran ini kemudian sangat memengaruhi struktur dan komposisi penduduk Sumatra Timur. Meski demikian, kajian ini tidak mengabaikan bahwa proses migrasi juga terjadi di luar kepentingan industri perkebunan, yang dilakukan secara mandiri oleh penduduk sekitar yang tertarik dengan pertumbuhan ekonomi Sumatra Timur.

Kata kunci: kolonialisme, kapitalisme, perkebunan, populasi, dan tenaga kerja.

A. PENDAHULUAN

Sumatra Timur merupakan sebuah keresidenan yang kemudian menjadi provinsi pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Wilayahnya saat ini meliputi area pesisir timur dari Provinsi Sumatra Utara. Pada masa kolonial, wilayah ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa karena ekspansi industri perkebunan sejak paruh kedua abad ke-19. Ekspansi industri perkebunan berhasil membawa Sumatra Timur dari wilayah yang diabaikan oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi salah satu pusat ekonomi paling penting di luar Jawa pada akhir abad ke-19. Transformasi yang signifikan ini membawa banyak perubahan pada struktur sosial, politik, ekonomi, dan kependudukan di Sumatra Timur (Thee 1977; Geertz 1976; Pelzer 1985).

Perubahan-perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh ekspansi kolonial yang dibarengi oleh penetrasi kapitalisme perkebunan. Kepentingan akumulasi kapital oleh industri perkebunan mengubah relasi-relasi sosial dan politik antara kelompok aristokrat Melayu dengan penduduk lokal dalam struktur agraria yang berdasarkan prinsip *domain verklaring*

dan UU Agraria 1870 (Ikhsan 2015; Pelzer 1985). Selain itu, proses akumulasi primitif dengan mengesampingkan hak-hak agraria penduduk lokal, ditambah lagi dengan proletarisasi yang memaksa kuli-kuli terikat dalam rezim kerja paksa dalam skema kuli kontrak, telah membentuk struktur dan kelas sosial yang timpang dalam masyarakat kolonial di Sumatra Timur (Bremen 1997; Stoler 1985). Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang pesat akibat ekspansi perkebunan tembakau, lalu karet dan tanaman perenial lain, mendorong berkembangnya jaringan infrastruktur dan tumbuhnya kota-kota baru, serta modernitas yang mengikutinya (Thee 1977).

Dalam persoalan kependudukan, ekspansi kolonial dan industri perkebunan ke Sumatra Timur telah mendorong pertumbuhan penduduk yang signifikan. Ketika Anderson (1826) melakukan kunjungan dan survei pada 1823, jumlah penduduk di Sumatra Timur diperkirakan hanya 350.000 pada 3 juta hektar luas wilayahnya. Dengan kata lain, kepadatan penduduknya hanya berkisar 11,16 jiwa per km². Selanjutnya, sensus penduduk pada 1930 menunjukkan bahwa penduduk di Sumatra Timur

telah berjumlah lebih dari 1.600.000 jiwa dengan jumlah kepadatan penduduk sekitar 53,3 per km² (Pelzer 1985). Dengan demikian, terjadi kenaikan jumlah penduduk sekitar empat kali lipat sejak survei Anderson pada 1823 hingga sensus penduduk tahun 1930.

Sumatra Timur dengan kompleksitas sejarahnya telah dikaji oleh banyak sejarawan. Persoalan utama, seperti perubahan struktur agraria dan konflik yang mengikutinya, telah dikaji oleh Pelzer (1985). Isu signifikan lain, yakni eksploitasi tenaga kerja, telah dikaji oleh Breman (1997), Stoler (1985), dan Said (1990). Isu perkembangan industri perkebunan dan pertumbuhan ekonomi telah dikaji oleh Thee Kian Wie (1977). Sementara itu, isu tentang modernitas dan perkembangan kota telah dibahas oleh Junaidi (2018). Dalam kajian tersebut, permasalahan kependudukan hanya dibahas sekilas sebagai pelengkap dari penjelasan perubahan sosial, politik, agraria, dan ekonomi di Sumatra Timur. Sementara itu, kajian-kajian historis tentang pertumbuhan penduduk yang telah dilakukan cenderung berfokus pada aspek sosial dari keberagaman penduduk (Pelly 1984; Sinaga 2020). Dengan kata lain, belum ada kajian yang membahas pertumbuhan penduduk dalam perspektif relasi produksi industri perkebunan sebagai sebuah permasalahan utama dalam diskusi.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan terhadap beberapa literatur di atas, permasalahan utama yang hendak dibahas dalam artikel ini adalah pertumbuhan penduduk di Sumatra Timur dalam kaitannya dengan industri

perkebunan. Rumusan masalah ini dijabarkan dalam pertanyaan penelitian, yakni bagaimana ekspansi kolonial dan industri perkebunan mendorong pertumbuhan penduduk di Sumatra Timur? Dalam relasi produksi seperti apa industri perkebunan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatra Timur?

Dalam kajian ini, persoalan pertumbuhan penduduk di Sumatra Timur dilihat dari konteks moda produksi kapitalis di wilayah *frontier* (Bernstein 2020). Sumatra Timur dipahami sebagai sebuah *frontier*, yakni wilayah yang diasosiasikan dengan *wilderness* (hutan belantara) yang memiliki sumber daya berlimpah namun terbelakang dan penduduknya yang relatif sedikit. Oleh karena itu, dalam pandangan kolonial, sebuah wilayah *frontier* harus dieksploitasi secara besar-besaran demi proses memperadabkan dan modernisasi. (Turner 1921). Dalam konteks Sumatra Timur, tantangan utama mentransformasi *wilderness* (hutan belantara) menjadi *civilization* (wilayah yang berperadaban) adalah ketersediaan tenaga kerja (Volker 1928; Breman 1997).

Di tengah ketersediaan lahan pertanian yang melimpah, sangat beralasan bagi penduduk lokal untuk menolak bekerja di perkebunan secara rutin. Penduduk lokal lebih memilih mengusahakan pertaniannya sendiri dengan sistem ladang berpindah atau menyewakan tanahnya kepada penggarap (Breman 1997). Oleh karena itu, pada masa awal perintisan, perusahaan perkebunan kesulitan untuk menyediakan tenaga kerja murah bagi

proses akumulasi primitif yang sangat fundamental bagi kelahiran kapitalisme di Sumatra Timur. Rezim tenaga kerja kemudian diciptakan dengan mengimpor kuli dari wilayah seberang lautan, seperti Straits Settlement, Tiongkok, maupun Jawa. Kuli-kuli tersebut dipekerjakan dengan sistem kerja paksa di bawah skema kuli kontrak dan *poenale sanctie* (Breman 1997).

Sementara itu, tanah sebagai alat produksi utama dalam kapitalisme perkebunan tidak pernah menjadi permasalahan serius bagi para tuan kebun sebab ketersediaannya yang relatif melimpah. Di samping itu, para tuan kebun dapat dengan mudah memperoleh tanah di bawah UU Agraria 1870. Di Sumatra Timur, seseorang bisa memperoleh tanah setelah mendapatkan konsesi secara langsung dari para aristokrat Melayu dan mengesampingkan hak-hak agraria penduduk lokal (Pelzer 1985; Ikhsan 2015). Dengan demikian, di Sumatra Timur, tanah menjadi faktor produksi yang lebih mudah didapatkan dari pada tenaga kerja itu sendiri (Breman 1997). Kebutuhan tenaga kerja mendorong industri perkebunan menginisiasi migrasi tenaga kerja ke wilayah ini.

Dengan melihat persoalan pertumbuhan penduduk dari relasi produksi kapitalis dan menganalisisnya secara statistik dari data yang tersedia, tulisan ini bertujuan memberikan sebuah penjelasan komprehensif tentang dampak industri perkebunan kolonial terhadap struktur kependudukan yang meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk di suatu wilayah, yang pengaruhnya masih dapat dirasakan hingga hari ini.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Adapun data yang dihimpun sebagai dasar analisis historis pertumbuhan penduduk di Sumatra Timur pada masa kolonial berasal dari keterangan catatan perjalanan para pelancong yang pernah mengunjungi Sumatra Timur, seperti Anderson (1826), Netscher (1864), dan Gramberg (1881). Selain itu, terdapat pula statistik tenaga kerja yang diterbitkan oleh perusahaan perkebunan dan sensus penduduk oleh pemerintah kolonial.

Dari keterangan catatan perjalanan tersebut diperoleh gambaran dan data tentang jumlah penduduk sebelum ekspansi kolonial. Sementara itu, dari statistik tenaga kerja dan sensus diperoleh data pertumbuhan penduduk Sumatra Timur pada masa kolonial.

Data tersebut menjadi dasar analisis untuk menjelaskan pertumbuhan penduduk di Sumatra Timur. Selanjutnya, data tersebut dielaborasi lebih lanjut dengan data mengenai industri perkebunan guna menjelaskan faktor-faktor yang mendorong pertumbuhannya.

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Pertumbuhan Penduduk Lokal

Sebelum membahas lebih jauh mengenai proses pertumbuhan penduduk setelah ekspansi kolonial, ada baiknya untuk melihat perkembangan populasi dari penduduk lokal pada masa sebelumnya untuk dapat mengukur pertumbuhan yang terjadi. Penduduk lokal dalam persepsi kolonial adalah kelompok masyarakat asli yang

mendiami wilayah Sumatra Timur, yang terdiri atas dua kelompok besar suku, yakni Melayu di wilayah pesisir dan Batak di pedalaman. Kedua kelompok masyarakat inilah yang diakui sebagai penduduk lokal atau masyarakat asli yang hak-hak agraria dan hukum adatnya diakui dan dijamin oleh pemerintah kolonial (Lengenberg 1982:3).

Sebelum ekspansi kolonial Belanda, Anderson memperkirakan bahwa keseluruhan penduduk Melayu Sumatra Timur dari Langkat hingga Siak berjumlah sekitar 350.000 jiwa yang tersebar di kampung-kampung kawasan bantaran sungai. Anderson (1826:210) memperkirakan bahwa jumlah rata-rata penduduk setiap kampung sekitar 100 hingga 200 jiwa. Pada masa ini jumlah penduduk Melayu di pesisir lebih rendah dibandingkan dengan Batak yang berada di pedalaman. Berkaitan dengan fenomena ini, Reid (1997) menyatakan bahwa persebaran penduduk seperti ini umumnya terjadi di sebagian besar wilayah Sumatra sebelum dimulainya ekspansi kolonial. Ekspansi kolonial merupakan faktor terbesar dalam persebaran penduduk ke wilayah-wilayah pesisir di Sumatra. Menurut Anderson, pada masa ini kawasan Sumatra Timur bagian utara, termasuk wilayah Deli, Langkat, dan Serdang, memiliki populasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah Sumatra Timur bagian selatan yang meliputi wilayah Batubara dan Asahan. Berikut adalah sebaran penduduk di setiap wilayah di Sumatra Timur berdasarkan catatan dari Anderson.

Wilayah	Melayu	Batak	Jumlah
Langkat	7.350	10.610	17.960
Deli	7.000	20.000	27.000
Serdang	3.000	8.000	11.000
Batubara	10.000	-	10.000
Asahan	-	-	70.000
Total			135.960

Tabel 1. Jumlah sebaran penduduk berdasarkan jurnal Anderson. Sumber: Anderson 1826.

Pertumbuhan penduduk Sumatra Timur tidak begitu signifikan atau bahkan cenderung mengalami penurunan pada tahun-tahun menjelang dibukanya perkebunan kolonial di wilayah Deli pada 1863. Netscher (1864:343) yang berkunjung pertama kali ke Deli pada 1862 memperkirakan penduduk di Kampung Labuhan berjumlah sekitar 1.000 jiwa. Pada tahun berikutnya, ketika Nienhuys (1903:33-35) tiba di Deli, ia memperkirakan bahwa penduduk di Labuhan hanya sekitar 2.000 jiwa. Jumlah penduduk Deli yang dikisarkan oleh Netscher maupun Nienhuys pada 1860-an jauh lebih sedikit dari perkiraan Anderson pada 1823. Menurut Anderson (1826:295), penduduk Deli pada tahun 1823 sekitar 7.000 jiwa, dengan komposisi penduduk yang beragam, yakni terdiri atas suku Melayu, Aceh, Jawa, keturunan Minangkabau, Bugis, Batak, dan Cina.

Karakteristik alam pesisir Sumatra Timur sesungguhnya bukan tempat yang mendukung untuk pertumbuhan penduduk. Secara umum, kawasan pesisir Sumatra Timur penuh dengan bakau, kanal sungai yang sempit dan berlumpur karena endapan material dari pegunungan, tanah gambut yang asam,

dan hampir seluruh wilayahnya masih didominasi hutan purba. Oleh karena itu, wilayah ini kurang mendukung untuk tumbuhnya permukiman manusia (Colombijn 1997:309). Namun, tampaknya masalah pertumbuhan penduduk di Sumatra Timur tidak hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Menurut Anderson (1826:295), penduduk Sumatra Timur yang relatif sedikit itu merupakan kompleksitas dari masalah lingkungan, kemiskinan dan perbudakan, kesuburan wanita, hingga peperangan dan madat candu.

Faktor lingkungan Sumatra Timur tidak hanya berpengaruh pada sulitnya membangun permukiman, tetapi berhubungan langsung dengan tingkat kesuburan wanitanya. Anderson mengindikasikan bahwa wanita di Sumatra Timur memiliki tingkat kesuburan yang singkat, meski rata-rata perempuan di sana melahirkan enam orang anak.

Perang menyebabkan penurunan populasi secara signifikan, terutama laki-laki. Misalnya, ketika sampai di Kampung Besar, Anderson menemukan sebagian besar penduduknya adalah perempuan, sedangkan penduduk laki-laki sangat jarang ditemui. Sebelum berjalannya otoritas kolonial, Sumatra Timur memang wilayah yang sering mengalami peperangan antarsuku dan antarwilayah. Perang ini sering kali disebabkan oleh permasalahan pertanian maupun perdagangan lada. Ketika itu, lada masih menjadi komoditas utama dari Sumatra Timur.

Selain itu, Anderson menyebutkan bahwa penggunaan candu berhubungan langsung dengan masalah kesehatan dan kesuburan penduduk lokal. Anderson menemukan bahwa di

wilayah yang jarang terdapat pecandu opium, seperti Serdang, penduduknya memiliki jumlah anak yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya. Meskipun wilayah ini lebih kecil dibanding dengan lainnya, namun anak-anak banyak terlihat berkerumun di sini.

Dalam tahun-tahun pertama pembukaan perkebunan, jumlah penduduk lokal Sumatra Timur masih melampaui pekerja migran perkebunan. Asisten Residen Deli, E.A. Hallewijn (1876) memperkirakan orang Melayu berjumlah 11.963 jiwa dan Batak 20.000 jiwa, sedangkan jumlah pekerja migran perkebunan, baik kuli maupun tuan kebun baru berjumlah 4.543 jiwa. Sementara Grambreg (1881:1041) menunjukkan angka yang berbeda, yakni 28.303 jiwa untuk jumlah keseluruhan penduduk lokal pada 1875 dan meningkat menjadi 30.204 jiwa pada tahun berikutnya. Ketika itu onderneming yang beroperasi baru berjumlah 40 unit. Cukup masuk akal untuk memperkirakan pertambahan jumlah pendatang, terutama kuli, di Sumatra Timur sejalan dengan besarnya jumlah perkebunan yang beroperasi ketika itu. Dengan demikian, semakin banyak jumlah perusahaan perkebunan dan perkebunannya yang beroperasi, semakin tenggelam pula jumlah penduduk lokal dengan jumlah kuli perkebunan.

Data kependudukan ini dapat diragukan karena pada masa itu sebaran pejabat kolonial di Sumatra Timur belum merata dan sering kali informasi yang digunakan hanya didasarkan pada kesaksian penguasa lokal, yakni kelompok aristokrat Melayu (Pelzer 1985:83). Meski demikian, Grambreg

menunjukkan indikasi adanya pertumbuhan penduduk lokal pada masa-masa awal pembukaan perkebunan. Ekspansi kolonial di Sumatra Timur sesungguhnya membawa perbaikan-perbaikan pada taraf kesehatan penduduk lokal. Perusahaan perkebunan memiliki catatan panjang mengenai sejarah penanganan kesehatan dan riset penyakit-penyakit tropis (Cremer 1889). Pengembangan penanganan kesehatan tidak hanya berdampak pada kuli kontrak, tetapi juga pada penduduk lokal, terutama dalam isu penanganan wabah penyakit. Pada tahun 1920-an, perusahaan perkebunan mengupayakan perbaikan tingkat kelahiran dan penurunan tingkat kematian, yang tidak hanya ditujukan pada kuli-kuli Jawa, tetapi juga pada penduduk lokal (Straub 1928).

Meskipun penanganan kesehatan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan penduduk lokal, namun hal ini tidak dapat dipastikan secara statistik. Sejauh yang dapat diketahui, jumlah penduduk lokal mengalami peningkatan cukup signifikan, sebagaimana yang dimuat dalam sensus penduduk tahun 1930. Sensus penduduk 1930 menunjukkan jumlah penduduk Melayu mencapai 225.000 jiwa atau sekitar 15% dari total populasi, sedangkan penduduk Batak (Karo dan Simalungun) mencapai 229.000 jiwa atau 15,3% dari total populasi (Pelzer 1985:86). Jumlah penduduk lokal tersebut meningkat tiga kali lipat dibandingkan data yang dilaporkan Anderson 1826 (lihat tabel 1).

2. Migrasi Tenaga Kerja Perkebunan

Proses masuknya pendatang ke Sumatra Timur, secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga, yakni migrasi oleh perusahaan perkebunan, migrasi secara mandiri, dan kolonisasi. Dalam ketiga proses itu, perusahaan perkebunan dan pemerintah kolonial memainkan peran yang besar. Pada mulanya, perusahaan perkebunan melakukan impor tenaga kerja kontrak secara besar-besaran dari wilayah seberang lautan, seperti Straits Settlement, kemudian langsung dari Daratan Cina, dan akhirnya dari Pulau Jawa. Selain pekerja yang didatangkan oleh perusahaan perkebunan, terdapat pula kelompok suku dan bangsa yang datang secara mandiri untuk menjadi pekerja lepas di perkebunan.

Cukup sulit untuk menarik angka pasti dari pertumbuhan penduduk dengan impor kuli yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan. Breman (1997: 63) menyebutkan bahwa sulitnya menghitung jumlah kuli yang kemudian menjadi penduduk Sumatra Timur disebabkan oleh adanya kuli-kuli yang tidak terdata oleh pusat biro imigrasi kuli Sumatra Timur. Jumlah mereka cukup banyak dan sulit terdeteksi. Mereka merupakan kuli yang bekerja di perusahaan perkebunan yang tidak masuk ke dalam anggota Deli Planters Vereeniging (DPV). Selain itu, terdapat pula kuli-kuli yang melarikan diri dan tinggal di tengah-tengah kampung-kampung penduduk lokal. Sulit untuk melakukan perhitungan secara statistik karena angka-angka yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan maupun biro imigrasi bersifat parsial. Lagi pula, sering kali didapatkan statistik yang berbeda satu sama lain. Pada angka-

angka statistik tertentu akan menampilkan data yang akan menguntungkan perusahaan perkebunan.

Meski demikian, diketahui bahwa ada persentase besar dari jumlah kuli yang diimpor itu yang kemudian menjadi penduduk tetap Sumatra Timur (Waal 1959:22) sebab ada kecenderungan yang terjadi di antara kuli-kuli dan juga faktor campur tangan dari perusahaan perkebunan, yang membuat mereka menetap dan menjadi penduduk Sumatra Timur. Hal ini jamak terjadi pertama-tama pada kuli-kuli kontrak Cina. Kuli Cina menjadi kelompok pekerja yang didatangkan sejak pertama kali perkebunan dibuka di Sumatra Timur. Proses uji coba penanaman tembakau oleh Nienhuys pada 1864 menemukan bahwa orang-orang Cina atau *towkehs* (kelompok orang Cina di Penang yang datang langsung dari negara asalnya dan terbiasa bekerja dengan sewa harian) sangat cocok untuk menanam tembakau. Kuli Cina yang didatangkan Nienhuys untuk pertama kalinya dari Penang hanya berjumlah 120 jiwa (Nienhuys 1903:33-35). Sejak saat itu, jumlah kuli Cina di perkebunan Sumatra Timur terus berlipat ganda. Pada 1867 atau sekitar tiga tahun setelah penanaman tembakau pertama oleh Nienhuys, jumlah kuli Cina mencapai 1.000 jiwa. Pada 1874, dengan 23 perusahaan perkebunan yang beroperasi, jumlah kuli Cina telah mencapai 4.480 jiwa (Gramberg 1881:1040).

Jumlah ini terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah perusahaan perkebunan yang beroperasi di Sumatra Timur. Proses rekrutmen tidak

lagi hanya dari Penang, tetapi juga langsung dari Cina Selatan (Bool 1903:6-7). Mengutip Breman (1997:62), total keseluruhan kuli Cina yang bekerja di Sumatra pada 1883 mencapai sekitar 20.000 jiwa. Pada 1888, jumlah itu bertambah menjadi 45.000 jiwa. Pada 1900, telah ada sekitar 70.000 kuli Cina di Sumatra Timur. Breman memperkirakan jumlah itu hanya mencakup 40% dari kuli Cina yang terdata oleh biro imigrasi dan Deli Planters Vereniging (DPV). Ini artinya, ada lebih banyak kuli Cina yang tidak terdata di Sumatra Timur.

Jumlah orang Cina semakin membeludak di Sumatra Timur, terutama disebabkan oleh pilihan kuli-kuli Cina untuk menetap di Sumatra Timur. Bool (1903) menunjukkan bahwa ada kecenderungan dari total kuli Cina yang didatangkan dari Straits Settlement dan Cina memilih tinggal di Sumatra Timur setelah masa kontraknya habis, hanya sekitar 10%-20% yang kembali ke negeri asalnya (lihat tabel 2).

Tahun	Jumlah Kuli Cina yang Didatangkan	Jumlah yang Kembali
1888	3.973	586
1889	8.670	1.562
1890	9.128	1.476
1891	6.862	1.127
1892	2.269	693
1893	5.882	964
1894	6.464	1.350
1895	10.305	2.140
1896	7.220	2.043
1897	5.819	1.910
1898	6.592	1.635
1899	7.892	1.948
1900	6.926	1.835
1901	5.572	2.186
1902	7.184	1.377

Tabel 2. Jumlah kuli Cina yang datang dan kembali. Sumber: Bool 1903:76-77.

Persentase kecil dari jumlah kuli yang kembali ke negeri asalnya disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, ada keinginan dari kuli-kuli itu sendiri untuk menetap secara permanen di Sumatra Timur, seperti sebagian besar kuli-kuli Cina dan juga Jawa. Misalnya, ekskuli Cina lebih memilih tinggal di Sumatra Timur karena mencari peluang ekonomi menjadi petani sayur, peternak babi, pedagang sembako di perkebunan, dan lain-lain (Anonim 1918:41). *Kedua*, ada indikasi yang kuat bahwa perusahaan perkebunan secara sengaja menghambat proses pemulangan kuli-kuli itu, baik melalui serangkaian aksi pengelabuan secara sistematis melalui kontrak kerja maupun mengatur sedemikian rupa lingkungan kerja di perkebunan yang membuat kuli terjatuh dan sulit keluar dari kontrak kerjanya. Tentu saja motifnya adalah demi menghemat biaya perekrutan kuli yang mahal dari wilayah seberang lautan itu (Bremant 1997:136-140).

Selain kuli-kuli Cina yang direkrut dengan sistem kontrak, terdapat pula tenaga kerja yang bekerja dengan sistem lepas atau pekerja bebas. Mereka adalah kelompok tenaga kerja yang direkrut di wilayah Sumatra Timur. Ini berarti migrasi ke Sumatra Timur dilakukan dengan upaya sendiri, bukan oleh perusahaan perkebunan (Bremant 1997:56). Tidak begitu jelas bagaimana kelompok tenaga kerja ini dapat sampai ke Sumatra Timur dan apa yang menggerakkannya ke Sumatra Timur. Namun, dapat dipastikan bahwa mereka tertarik dengan perekenomian yang berkembang secara pesat di wilayah

dataran rendah pesisir Sumatra Timur itu.

Dilihat dari jumlahnya, pekerja bebas jauh di bawah jumlah pekerja kontrak yang didatangkan oleh perusahaan perkebunan. Mereka terdiri atas berbagai suku dan ras yang mengisi spesialisasi dan posisi kerja tertentu di perusahaan perkebunan. Sekali lagi, pembagian dan spesialisasi kerja ini menunjukkan ciri moda produksi kapitalis oleh perkebunan kolonial di Sumatra Timur (Bremant 1997:24). Orang-orang Siam, Boyan atau Bawean; penduduk lokal, seperti Melayu dan Batak Karo; serta penduduk sekitar Sumatra Timur, seperti Gayo dan Alas; umumnya menjadi pekerja lepas sebagai penebang dan pembersih hutan. Pekerjaan ini juga terkadang dikerjakan oleh pekerja lepas Cina. Orang-orang Jawa dan Banjar umumnya dipekerjakan untuk mencangkul lahan dan membangun parit-parit maupun bangunan bangsal-bangsal di emplasemen perkebunan (Westerman 1901:68). Sementara itu, sebagian besar orang-orang India Tamil dan Bengali memiliki spesialisasi pekerjaan sebagai pengemudi kereta-kereta sapi, yang menjadi transportasi satu-satunya di perkebunan sebelum kereta api dibangun pada 1885 (Anonim 1904).

Kelompok-kelompok kuli dan pekerja dari berbagai suku dan ras inilah yang menjadi bagian dari masyarakat *frontier* Sumatra Timur. Dari tangan mereka, hutan purba Sumatra Timur diubah menjadi lahan pertanian dan lingkungan permukiman yang lebih layak huni. Meskipun kelompok

sukunya cukup beragam, namun jumlah pekerja lepas tidak begitu signifikan dibanding dengan kuli kontrak Cina maupun kemudian Jawa (Thee 1977:38). Menurut data yang dikumpulkan dari *Kolonial Verslag* oleh Breman, jumlah pekerja lepas dalam kurun waktu 1881 hingga 1902 hanya berkisar 20% hingga 10% dari total pekerja di perkebunan Sumatra Timur.

Kuli-kuli Cina tetap mengisi persentase terbesar dari tenaga kerja di perkebunan, setidaknya hingga dasawarsa pertama abad ke-20 sebelum akhirnya dilampaui oleh kuli-kuli dari Jawa. Thee (1977:38) memperkirakan bahwa dalam kurun setengah abad setelah pembukaan perkebunan, jumlah kuli Cina yang pernah bekerja di Sumatra Timur mencapai sekitar 300.000 jiwa. Ada keterkaitan secara langsung antara pergeseran dominasi dari kuli Cina menjadi kuli Jawa dengan berkembangnya perkebunan perenial, seperti karet, teh, kelapa sawit, dan serat rami-sisal. Jumlah tenaga kerja dari Jawa perlahan-lahan semakin besar, terutama ketika *booming* karet yang terjadi setelah tahun 1906.

Di samping alasan peningkatan kebutuhan tenaga kerja, menurut Breman (1997:64), faktor lainnya yang turut memengaruhi peningkatan jumlah orang Jawa adalah adanya spekulasi mengenai kesulitan mendatangkan kuli Cina dalam jumlah besar ke Sumatra Timur karena adanya protes mengenai buruknya kondisi kerja di Sumatra Timur serta larangan-larangan dari otoritas pemerintah Cina. Dengan demikian, Pulau Jawa muncul menjadi kantong tenaga kerja baru bagi perusahaan perkebunan di Sumatra

Timur. Sebagian besar kuli-kuli Jawa didatangkan melalui pos-pos imigrasi yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti Malang, Kediri, Madioen, Solo, Djokja, Klaten, Keboemen, Magelang, Poerwokerto, Tjilatjap (Broersma 1922:154).

Tahun	Jumlah Kuli Cina	Jumlah Kuli Jawa
1883	21.136	1.711
1893	41.700	18.000
1898	50.846	22.256
1906	53.105	33.802
1913	53.617	118.517
1920	27.715	209.459
1930	26.037	234.554

Tabel 3. Jumlah perbandingan kuli Jawa dan kuli Cina. Sumber: Thee 1977:39.

3. Kolonisasi Kuli Jawa

Pergeseran dari kuli Cina ke kuli Jawa secara masif di perkebunan Sumatra Timur membawa dampak signifikan terhadap perubahan komposisi penduduk, terutama setelah adanya skema kolonisasi, baik dari perusahaan perkebunan maupun pemerintah kolonial. Kolonisasi sendiri berarti memindahkan orang-orang Jawa dari kampung halamannya, beserta dengan anak dan istrinya, untuk menetap di wilayah baru untuk kepentingan tertentu. Ini artinya terdapat konsentrasi orang Jawa yang menetap dan menjadi penduduk Sumatra Timur. Tidak mengherankan jika pada sensus penduduk tahun 1930 orang Jawa mengisi sekitar 40% dari jumlah penduduk Sumatra Timur.

Praktik kolonisasi kuli Jawa di perkebunan telah dilakukan sejak permulaan abad ke-20, namun belum memiliki skema dan regulasi yang jelas. Seperti misalnya, Deli Batavia Maatschappij telah mendirikan koloni

kuli Jawa dengan 10 hingga 20 keluarga dalam tahun 1902-1904. Deli Maatschappij juga membuka koloni di 7 perkebunannya dengan 30 hingga 70 keluarga, sementara di Senembah pada 1912-1913 sebuah koloni kuli Jawa dibentuk dengan 10 hingga 12 keluarga. Dalam kurun 1912-1915, Amst.-Deli Maatschappij, Tabak-Maatschappij Medan, Tab.-Maatschappij Arendsburg dan United Langkat Cij ikut membuka koloni sehingga pada tahun 1917 terdapat 1.314 koloni seluruhnya dengan 1.188 wanita dan 1.748 anak-anak (Broersma 1922:64).

Kuli beserta keluarganya diberi rumah dan tanah pekarangan, dengan syarat harus bekerja di perkebunan selama waktu yang ditentukan. Jumlah kuli Jawa yang didatangkan bersama dengan keluarganya dapat mencapai jumlah lebih dari dua kali lipat dari angka seharusnya apabila kuli didatangkan sendirian (Broersma 1922:64). Angka-angka di bawah ini dapat memberikan gambaran mengenai pertambahan penduduk melalui proses awal kolonisasi kuli Jawa dan keluarganya sejak dekade awal abad ke-20. Berikut adalah jumlah kuli dan keluarganya yang didatangkan oleh DPV.

Tahun	Jumlah Kuli Jawa	Jumlah Kuli Jawa Bersama Keluarganya
1913	1.410	3.203
1914	799	1.509
1915	1.045	2.197
1916	2.336	4.912
1917	3.441	7.119
1918	5.296	11.534
1919	3.974	9.137

Tabel 4. Jumlah kuli Jawa yang didatangkan bersama keluarganya dari tahun 1913-1919.

Sumber: Broersma 1922:156.

Pemerintah dan perusahaan perkebunan telah memulai debat panjang mengenai program kolonisasi kuli Jawa sejak permulaan abad ke-20 (Broersma 1922:160). Pemerintah kolonial menginginkan kolonisasi pertanian orang-orang Jawa untuk kepentingan produksi pangan di Sumatra Timur karena telah sejak lama Sumatra Timur mengalami defisit pangan. Hal ini kemudian diperparah dengan Perang Dunia I yang memblokir jalur impor pangan. Skema seperti ini mengharuskan adanya ketersediaan lahan yang luas. Perusahaan perkebunan hanya menginginkan skema kolonisasi pekerja untuk kepentingan pemenuhan tenaga kerja setelah *poenale sanctie* dihapuskan. Skema yang ditawarkan oleh perusahaan perkebunan memungkinkan adanya sistem pekerja lepas di perkebunan dengan keterikatan pada perkebunan. Hadirnya kuli Jawa beserta keluarganya merupakan keuntungan besar karena perempuan dan anak-anak menjadi tenaga kerja tambahan yang murah bagi perusahaan perkebunan.

Pada realisasinya, baik skema kolonisasi pertanian maupun kolonisasi pekerja, tetap berjalan di Sumatra Timur. Pemerintah mulai membangun proyek kolonisasi pertanian untuk penanggulangan masalah darurat pangan di wilayah Percut, Sialang Buah, Sisir Guntung, dan Serdang. Program ini memungkinkan ekskuli kontrak Jawa dan Banjar bermukim di sebuah wilayah dengan persawahan yang dapat digarap dengan fasilitas irigasi oleh pemerintah kolonial (Pelzer

1987:146). Sementara itu, perusahaan perkebunan tetap mendatangkan kuli Jawa dan keluarganya untuk tinggal di perkebunan. Ini adalah strategi perusahaan perkebunan untuk membentuk lingkungan kerja yang mengikat, tetapi tidak berkesan paksaan, untuk menggantikan skema *poenale sanctie*. Dengan demikian perkebunan menjadi kantong-kantong bagi permukiman orang-orang Jawa. Terlepas dari skema yang berbeda, kolonisasi membawa dampak besar terhadap jumlah orang Jawa di Sumatra Timur. Sensus penduduk (*volkstelling*) tahun 1930 menunjukkan bahwa orang Jawa mengisi sekitar 40% dari total komposisi penduduk Sumatra (Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel 1933).

4. Tingkat Kematian dan Kelahiran di Perkebunan

Tingkat kematian dan kelahiran di perkebunan berhubungan dengan perkembangan pelayanan kesehatan dan riset kedokteran yang difasilitasi oleh perusahaan perkebunan. Perkebunan di Sumatra Timur memiliki tradisi panjang dalam penanganan kesehatan terhadap kuli-kulinya. Sejak tenaga kerja harus didatangkan dari seberang lautan, masalah kesehatan dari tenaga kerja tersebut tentu menjadi bagian penting dari investasi industri perkebunan di Sumatra Timur. Tidak dapat dimungkiri bahwa perkembangan pelayanan kesehatan dan riset kedokteran membawa dampak positif, tidak hanya bagi kepentingan pragmatis industri perkebunan, tetapi juga bagi peningkatan taraf kesehatan penduduk

lokal dan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri.

Pelayanan kesehatan secara sederhana telah dipraktikkan sejak masa awal pembukaan perkebunan di Deli. Pekerjaan berat mengubah hutan menjadi lahan perkebunan, serta lingkungan Deli yang pada dasarnya mematikan, menyebabkan banyak gangguan kesehatan, terutama luka akibat menerobos hutan, malaria, dan penyakit tropis lainnya (Cremer 1889:261-262). Pada masa perintisan perkebunan, tenaga medis bergantung pada Straits Settlement. Sejak 1871, dokter Eropa pertama didatangkan, dan pada tahun yang sama pula rumah sakit perkebunan pertama didirikan di Deli Maatschappij. Sejak saat itu, setiap perkebunan memiliki pelayanan rumah sakit. Keharusan merawat kuli yang sakit secara legal tertuang dalam regulasi *Poenale Sanctie* (Volker 1928:24).

Breman menyatakan bahwa meskipun pelayanan kesehatan terus diberikan, namun risiko terjangkit penyakit bahkan kematian terus menghantui kuli karena kerja yang terlalu berat yang dibebankan kepada setiap kuli. Lebih lanjut, Breman maupun Stoler mengungkapkan bahwa ada indikasi penyelewengan dalam data statistik dari perusahaan perkebunan, seperti pada jumlah kuli yang berpenyakit menjijikkan (sifilis) maupun tingkat kematian kuli itu sendiri. Hal ini tentu dibuat dengan tujuan menjaga citra dari perusahaan perkebunan kolonial (Stoler 1985:52). Breman (1987:63-64) memperkirakan bahwa dari 4 kuli yang dipekerjakan, satu di antaranya meninggal di perkebunan.

Data mengenai tingkat kematian kuli di seluruh Sumatra Timur sulit didapatkan, bahkan hingga tahun 1920-an. Secara umum, statistik kesehatan menyangkut penyakit, jumlah penderita, dan kematian, menjadi hal yang langka di perkebunan Sumatra Timur (Anonim a 1929). Rumah sakit-rumah sakit di perkebunan memang telah lama memiliki catatan statistik kesehatan kuli-kuli, akan tetapi belum ada upaya pengumpulan data tersebut, hingga pada akhirnya dikerjakan oleh Driel di Laboratorium Patologi Medan. Dalam laporannya, Driel (1935:1795-1800) memproduksi statistik kematian kuli yang disertai penyebab kematiannya. Dari laporannya disebutkan penyebab kematian tertinggi pada kurun 1916-1932 adalah pneumonia, tuberkulosis, malaria, dan penyakit yang berkaitan dengan tingkat kebersihan.

Sementara itu, tingkat kelahiran bayi bukan merupakan bagian dari ketertarikan pengembangan riset kedokteran di perkebunan Sumatra Timur sebelum terjadi pergeseran regulasi kuli kontrak pada abad ke-20. Seiring dengan semakin besarnya kritikan terhadap *poenale sanctie*, muncul usulan untuk mengubah skema tenaga kerja di perkebunan Sumatra Timur dengan sistem pekerja lepas. Untuk mencapai tujuan itu, peran pembentukan keluarga sangat besar, karena keluarga dalam skema regulasi kuli terbaru menjadi institusi yang terikat dengan perusahaan perkebunan melalui pemberian tanah dan pembangunan rumah di lingkungan perkebunan (Straub 1928:3-21).

Program ini lebih dikenal dengan nama kolonisasi kuli Jawa sebagaimana yang telah disinggung pada bagian sebelumnya.

Tahun	Jumlah Kuli	Tingkat Kematian (per 1000 jiwa)
1919	216.573	15,16
1920	235.156	18,57
1921	175.649	18,19
1922	159.279	16,05
1923	147.276	13,06
1924	144.902	10,45
1925	146.558	10,81
1926	181.204	14,55
1927	207.066	17,48
1928	-	9,20
1929	-	9,58
1930	-	8,95
1931	-	7,80
1932	-	6,72

Tabel 5. Perkiraan tingkat kematian kuli di Sumatra Timur. Sumber: Anonim a 1929; Driel 1935.

Sejak tahun 1920-an mulai muncul perhatian besar terhadap tingkat kelahiran dan kematian bayi di perkebunan Sumatra Timur, terutama di kalangan dokter perkebunan. Beberapa orang dokter, yakni Dr. Breman, Dr. Smith, dan kemudian Dr. Straub, menjadi pioner dalam penelitian kesehatan anak di perkebunan Sumatra Timur. Pada 15 Mei 1926, dilangsungkan pertemuan antara perwakilan pengusaha perkebunan dan asosiasi dokter perkebunan untuk membahas permasalahan tingkat kelahiran dan kematian bayi di perkebunan, yang dianggap menjadi masalah kesehatan baru di perkebunan yang harus ditangani. Hasil dari pertemuan itu menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kelahiran bayi, seperti pemberian cuti hamil dan melahirkan, memperbanyak jumlah

bidan, mewajibkan orang tua memeriksakan anaknya secara rutin, dan disediakannya ruang bersalin khusus (Anonim 1939).

Tentu sulit untuk menghadirkan statistik angka kelahiran dan kematian bayi di seluruh wilayah perkebunan maupun luar perkebunan. Akan tetapi, sebagai gambaran, berikut adalah angka statistik kelahiran dan kematian bayi di beberapa perkebunan besar di Sumatra Timur pada tahun 1920-an.

Perkebunan Sumatra Timur	Kelahiran	Kematian
H.A.P.M (Hollandsch Amerikaansche Plantage Mij) 1924-1926	1.857	687 (37%)
Deli Mij (kebun tembakau) 1925-1926	4.145	1.153 (28%)
Serdang Doctor Fonds 1925-1926	1.012	241 (24%)
Deli Mij (kebun karet) 1924-1926	227	59 (26%)
Senembah Mij (kebun tembakau) 1926	497	94 (19%)

Tabel 6. Tingkat kematian dan kelahiran bayi di beberapa perkebunan Sumatra Timur.
Sumber: Straub 1926:33.

5. Keragaman Komposisi Penduduk
Keberhasilan Nienhuys merintis perkebunan tembakau telah mendorong gelombang migrasi orang-orang dari berbagai suku dan bangsa. Sejak masa perintisan, pengusaha perkebunan Eropa dari berbagai kebangsaan berduyun-duyun memasuki Sumatra Timur. Broersma (1919:51) mencatat pengusaha Eropa itu berasal dari Belanda, Inggris, Prancis, Belgia, Rusia, Jerman, Swiss, dan kemudian

muncul Amerika, lalu Jepang yang statusnya disamakan dengan bangsa Eropa. Meskipun bangsa Eropa memiliki dominasi besar dalam aspek ekonomi dan politik, namun jumlah mereka hanya mengisi sekitar 0,7% dari total populasi tahun 1930. Migrasi orang-orang Eropa cenderung berjalan lambat dibanding dengan migrasi orang-orang Asia ke Sumatra Timur.

Pada mulanya, kebutuhan tenaga kerja Eropa dalam jumlah kecil di perkebunan secara langsung menyebabkan kecilnya pertumbuhan orang Eropa. Gamberg (1881:1040) mencatat bahwa pada 1875 orang Eropa baru berjumlah 85 jiwa, dan tahun berikutnya bertambah menjadi 124 jiwa. Selain itu, larangan menikah di kalangan asisten kebun juga membawa pengaruh besar terhadap jumlah orang Eropa, terutama kaum wanita Eropa. Kolonisasi Eropa mungkin benar-benar terjadi setelah kebijakan melarang asisten kebun di Sumatra Timur benar-benar dihapuskan pada 1920-an. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan jumlah orang Eropa, terutama wanita-wanita Eropa (Wertheim 1993:268-284). Pada 1920, jumlah orang Eropa di Sumatra Timur mencapai 7.882 jiwa dan pada dasawarsa berikutnya mencapai 11.000 jiwa (Volker 1928:25).

Sementara itu, migrasi pribumi Indonesia telah terjadi sejak masa-masa awal pembukaan perkebunan. Residen Baron de Raet melaporkan bahwa pada saat Nienhuys baru membuka perkebunannya, telah terdapat arus migrasi orang-orang dari Sumatra Barat ke wilayah Labuhan dan sekitarnya. Selain itu, juga dilaporkan keberadaan orang-

orang Cina dari Penang dan sekitarnya yang mengambil peluang ekonomi dengan berjualan sembako dan candu. Jumlah orang Cina di luar kuli kontrak ini dilaporkan cukup signifikan (Raet 1876).

Secara umum, migrasi yang terjadi di luar inisiasi perusahaan perkebunan bertujuan mengejar peluang ekonomi dari perkembangan perkebunan kolonial. Diketahui orang-orang Mandailing dan Minangkabau secara berangsur-angsur bermigrasi ke Sumatra Timur, mula-mula di bagian Selatan, seperti Panei, Bila, dan Kota Pinang, kemudian terus maju ke wilayah pusat *cultuurgebied*, yakni Deli, Serdang, Langkat, dan Asahan (Pelly 1994). Orang-orang Mandailing diketahui umumnya mengisi jabatan administrasi di perkebunan, sedangkan orang-orang Minangkabau kebanyakan lebih memilih berdagang. Orang-orang Mandailing dan Minangkabau sering kali ditemui berbaur dengan penduduk lokal, yakni orang-orang Melayu, terutama di wilayah Panei, Bila, dan Kota Pinang. Pada sensus 1930, orang Mandailing di Sumatra Timur berjumlah 34.000 jiwa dan jumlah orang Minangkabau pada 1920 sekitar 15.002 jiwa. Sementara itu, migrasi pada orang-orang Batak Toba ke wilayah Simalungun sejak 1910 dilakukan dengan campur tangan pemerintah kolonial dalam upaya menanggulangi masalah produksi pangan di Sumatra Timur. Sejak saat itu, migrasi Batak Toba terus mengisi ruang demografi Sumatra Timur (Waal 1959:21-22).

6. Berkembangnya Permukiman

Pertumbuhan penduduk yang signifikan mendorong lahirnya permukiman baru, seiring dengan ekspansi kolonial di Sumatra Timur. Pada masa sebelum ekspansi kolonial, permukiman penduduk cenderung terkonsentrasi di wilayah sekitar sungai-sungai. Adapun perkampungan yang didirikan di sekitar sungai biasanya terdiri atas 100 hingga 200 rumah (Anderson 1826:210). Kedudukan sungai menjadi penting bagi pembentukan pola permukiman penduduk Sumatra Timur prakolonial karena sungai adalah satu-satunya sarana transportasi yang memungkinkan di tengah ketiadaan jalan yang melintasi hutan purba. Selain itu, daerah bantaran sungai di Sumatra Timur merupakan wilayah subur yang memungkinkan masyarakat untuk bertani dengan lebih mudah dibandingkan dengan membuka hutan (Anonim 1904:808-809). Dengan kata lain, sungai adalah faktor ekonomi yang fundamental bagi penduduk lokal prakolonial.

Setelah ekspansi kolonial dan industri perkebunan, peran sungai sebagai akses ekonomi mulai bergeser. Pada saat yang sama, pola permukiman mulai berubah. Sungai secara perlahan-lahan ditinggalkan karena pada masa ini sungai telah mengalami pendangkalan sehingga tidak dapat lagi menjadi sarana transportasi utama. Di sisi lain, perusahaan perkebunan mulai membuka akses ke pedalaman dengan membuka jalan-jalan di tengah hutan. Jalan-jalan perusahaan perkebunan ini merupakan embrio bagi jaringan jalan yang ada di Sumatra Timur (Pelzer 1985:87-88).

Ekspansi kolonial di Sumatra Timur memunculkan kesempatan ekonomi baru yang sebagian besar tidak lagi terhubung dengan penguasaan terhadap sungai, melainkan dengan kedekatan terhadap akses jalur-jalur darat. Meskipun jaringan jalan-jalan raya kolonial membawa peran besar terhadap proses pertumbuhan permukiman, namun ini bukan satu-satunya realitas dalam proses tersebut. Pertumbuhan permukiman pada masa ini juga terkait dengan kontrol kolonial atas penduduk, terutama melalui program kolonisasi dan pengaturan dusun di wilayah Deli, Serdang, dan Langkat (Pelzer 1985:109). Di samping itu, ada pula pembukaan permukiman yang didasari oleh keadaan spontan, terutama di daerah-daerah dekat perkebunan maupun perkampungan penduduk lokal oleh pendatang.

Secara umum, pertumbuhan permukiman di Sumatra Timur pada masa kolonial lebih cenderung mengarah kepada pola ruralisasi dibandingkan dengan urbanisasi. Menurut sensus penduduk tahun 1930, hanya sekitar 8% dari total penduduk Sumatra Timur yang tinggal di lima kota, yakni Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, dan Tanjung Balai. Sebanyak 29% dari total penduduk Sumatra Timur masih tinggal di perkebunan, sedangkan sekitar 63% selebihnya tinggal di desa-desa dan perkampungan. Sebagian besar penduduk perkotaan di Sumatra Timur adalah orang-orang Cina. Waal menyebutkan jika jumlah orang Cina di perkotaan di Sumatra Timur pada umumnya lebih besar dibandingkan kota-kota di Pulau Jawa. Di Medan,

jumlah orang Cina mencapai 36% dari total populasi, sedangkan di Bindjei 42%, di Tebing Tinggi 35%, di Pematang Siantar 32%, dan di Tandjung Balai 46%. Sebagian besar dari orang-orang Cina yang tinggal di perkotaan berprofesi sebagai pedagang. Sebagian besar penduduk perkotaan di Sumatra Timur adalah orang-orang Cina. Waal menyebutkan jika jumlah orang Cina di perkotaan di Sumatra Timur pada umumnya lebih besar dibandingkan kota-kota di Pulau Jawa. Di Medan, jumlah orang Cina mencapai 36% dari total poulasi, sedangkan di Bindjei 42%, di Tebing Tinggi 35%, di Pematang Siantar 32%, dan di Tandjung Balai 46%. Sebagian besar dari orang-orang Cina yang tinggal di perkotaan berprofesi sebagai pedagang (Waal 1959:24).

Berbeda dengan orang-orang Cina, orang-orang Jawa yang sebagian besar merupakan kuli bebas atau bekas kuli kontrak, memilih menetap di daerah sekitar perkebunan, perkampungan, atau wilayah pinggiran kota. Para bekas kuli kontrak biasanya akan menyewa tanah hutan maupun kebun dari penduduk lokal untuk menanam tanaman pangan. Untuk penyewaannya, bekas kuli-kuli Jawa itu hanya perlu mendatangi kepala adat kampung tersebut (Anonim 1918:40). Selain menyewa dari penduduk lokal, bekas kuli-kuli Jawa juga dapat memperoleh tanah dari perusahaan perkebunan dengan sistem menumpang. Dengan sistem menumpang tanah berarti kuli-kuli Jawa itu dapat mengolah tanah milik perkebunan selama orang-orang Jawa itu mau menjadi pekerja lepas di perkebunan.

Dengan demikian, perusahaan perkebunan memiliki peran besar dalam pembentukan permukiman di sekitar perkebunan karena penduduk di tempat bermukim baru itu adalah cadangan tenaga kerja bagi perusahaan perkebunan. Tumbuhnya permukiman di sekitar perkebunan ini juga merupakan bagian dari program kolonisasi pekerja oleh perusahaan perkebunan. Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, program ini menjadi pengganti skema *poenale sanctie* sejak 1927, dengan mewajibkan perusahaan perkebunan memberikan rumah dan tanah pekarangan kepada mereka yang telah memiliki keluarga (Anonim b 1929).

Selain bekas kuli kontrak Jawa, terdapat juga bekas kuli Cina dan pendatang Cina yang menyewa tanah dari penduduk lokal untuk menanam sayur-sayuran dan memelihara babi. Kelompok orang-orang Cina ini biasanya datang bergerombol dan menyebabkan kolonisasi di suatu wilayah. Selain melalui perusahaan perkebunan, gelombang migrasi dari orang-orang Cina juga terjadi dengan usaha sendiri. Kelompok ini banyak mengejar peluang ekonomi yang berkembang di Sumatra Timur, salah satunya dengan menjadi petani sayur (Anonim 1918:41).

Dengan berkembangnya jalan poros yang menghubungkan perbatasan Aceh sampai Tapanuli, permukiman penduduk dibangun berdekatan dengan akses jalan. Penduduk lokal atau mereka yang telah membangun perkampungan biasanya membuat jalan-jalan yang menghubungkannya dengan jalan utama. Misalnya, pada

jalan raya Lubuk Pakam-Tebing Tinggi, penduduk sekitar membuat jalan penghubung dari jalan poros ke kampung-kampung sekitar, seperti Kampung Sungai Bukhum, Kampung Nipah, dan lain-lain. Selain itu, terdapat kecenderungan penduduk memperluas wilayah permukimannya ke sekitar jalan-jalan raya yang sedang dibangun. Misalnya, pada pembangunan jalan raya Pangkalan Brandan-Tamiang, penduduk lokal secara berangsur-angsur pindah ke wilayah yang dekat dengan jalan raya. Ini dilakukan karena jalan-jalan raya menjadi jalur lalu lintas perdagangan yang baru (Anonim b 1929).

Sementara itu, muncul pula permukiman-permukiman baru dengan sawah-sawah di sekitar jalan-jalan raya. Permukiman dengan sawah biasanya didirikan oleh pendatang, terutama orang-orang Jawa dan Batak Toba. Dalam hal ini, terdapat peran pemerintah kolonial untuk mendorong pembentukan permukiman orang-orang Jawa di tanah yang kosong, yang beberapa di antaranya terletak di sekitar jalan raya yang baru. Orang-orang Jawa di tempat itu akan membentuk kelompok-kelompok dan bercocok tanam sawah. Pemerintah kolonial akan memfasilitasi pembangunan irigasi dan penyaluran air ke wilayah tersebut untuk mendorong pertanian sawah orang-orang Jawa itu (Anonim b 1929).

Selain dorongan dari pemerintah, biasanya juga terdapat kelompok-kelompok orang-orang Jawa yang membuka perkampungannya secara spontan di dekat jalan-jalan raya, beserta sawah dan sistem irigasi yang dibangun secara mandiri. Pada setiap

titik-titik kolonisasi, dalam waktu enam tahun jumlah penduduk Jawa bisa mencapai 490 hingga 1.500 kepala keluarga (Anonim b 1929). Dengan demikian, tidak mengherankan jika pada hari ini pun kita masih dapat menemukan hal yang sama di Sumatra Timur, di mana pada jalan-jalan porosnya ditemukan selingan sawah, permukiman, dan perkebunan monokultur.

Perkembangan jalan raya secara langsung mendorong munculnya embrio kota-kota penting di Sumatra Timur. Kota-kota yang dahulu berkembang di wilayah pesisir kemudian beralih ke area sekitar jalan raya. Pelzer mengungkapkan bahwa baik orang-orang biasa, pemerintah kolonial, maupun pemerintahan kesultanan berbondong-bondong memindahkan pusat kegiatannya, seperti dari Tanjungpura ke Binjai, dari Labuan Deli ke Medan, dari Rantau Panjang ke Lubuk Pakam, dari Sungai Pariuk ke Tebingtinggi, dari Kuala Tanjung ke Indrapura, ataupun dari Tanjung Tiram ke Lima Puluh. Ini merupakan cikal bakal munculnya kota-kota baru di Sumatra Timur (Pelzer 1985:88).

D. SIMPULAN

Relasi produksi kapitalis oleh industri perkebunan secara langsung memengaruhi struktur kependudukan Sumatra Timur. Kebutuhan tenaga kerja murah yang tidak dapat dipenuhi oleh penduduk lokal memaksa perusahaan perkebunan mengimpor tenaga kerja dari wilayah seberang lautan. Sejak masa perintisan, situasi ini telah menyebabkan perubahan komposisi penduduk Sumatra Timur. Selanjutnya,

pergeseran skema kontrak tenaga kerja dari *poenale sanctie* ke pekerja bebas kembali memengaruhi struktur kependudukan melalui program kolonisasi kuli Jawa. Pergeseran ini juga memengaruhi pola permukiman di Sumatra Timur yang tumbuh di sekitar perkebunan maupun jalan-jalan raya.

Dari tren pertumbuhan penduduk di Sumatra Timur pada masa kolonial terlihat bahwa industri perkebunan memberikan pengaruh yang besar pada struktur kependudukan Sumatra Timur. Namun demikian, pengaruh itu tidak hanya disebabkan oleh kepentingan produksi, tetapi juga oleh tumbuhnya perekonomian yang menyedot migrasi dari wilayah sekitar Sumatra Timur. Perubahan struktur kependudukan ini kemudian menjadi salah satu warisan dari sejarah kejayaan industri perkebunan kolonial sejak paruh kedua abad ke-19 di Sumatra Timur.

DAFTAR SUMBER

- Anderson, John. 1826. *Mission to the East Coast of Sumatra*. Blackwood: London.
- Anonim. 1904. "Een ander over Deli." *Indische Mercur*, November, 22.
- Anonim. 1918. *Mededeelingen van het Bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen Bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau*. Semarang-Surabaya-Den Haag: N.V. Boekhandel & Drukkerji.
- Anonim a. 1929. "Strefte onder Contractsarbied." *Algemeene Handelsblad*, April, 28.

- Anonim b. 1929. "Landbouw en Arbiedkolonisatie." *De Sumatra Post*, Juni, 05.
- Anonim. 1939. "Ootskust van Sumatra Instituut Vergadering te Amsterdam." *De Sumatra Post*, Desember, 28.
- Bernstein, Henry. 2020. *Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria*. Yogyakarta: Insist Press.
- Breman, Jan. 1997. *Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial, Tuan Kebun, Kuli di Sumatra Timur pada Awal Abad ke-20*. Jakarta: PT. Pusataka Utama Grafiti.
- Bool, H.J. 1903. *De Chinese Immigratie naar Deli*. s.l: s.n.
- Broersma, R. 1919. *Oostkust van Sumatra: De Ontluiking van Deli*. Batavia: Javasche Boekhandel & Drukkerij.
- _____. 1922. *De Ontwikkeling van het Gewest, Deventer: De Uitgave van Dixon*. Batavia: Javasche Boekhandel & Drukkerij.
- Colombijn, Freek 1997. "The Ecological Sustainability of Frontier Societies in Eastern Sumatra." Hlm. 309-40, dalam *Paper Landscape, Exploration in the Environmental History of Indonesia*, disunting oleh Peter Boomgaard, Freek Colombijn, and David Henley. Leiden: KITLV Press.
- Cremer, J.T. 1889. "Deli Schetsen: Geneeskundig Verpleging." *Eigen Haard* (22):56-61.
- Departement van Landbouw, Neijverheid en Handel. 1933. *Volkstelling 1930*.
- Driel, B. M. van 1935. "De sterfte der Ondernemings Arbeiders in de Buitengewesten van Nederlandsch-Indië in 1931 en 1932." *Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsche-Indie* 75(21):1795-819.
- Geertz, Clifford. 1976. *Involusi Pertanian: Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta: Bhratara.
- Gramberg, J.S.G. 1881. "De Oostkust van Sumatra V". *Indische Gids* 3(1): 356-71.
- Halewijn, E. A. 1876. "Geographische en Ethnographische Gegevens Betreffende het Rijk van Deli (Oostkust van Sumatra)." *Indische Land,- Taal,- en Volkenkunde* 23: 147-58.
- Ikhsan, Edy .2015. *Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum: Hilangnya Ruang Hidup Orang Melayu Deli*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Junaidi. 2018. "Transformasi Modernitas di Kota Medan: Dari Kampung Medan Putri Hingga Gemeente Medan." *Jurnal Sejarah* 1(2):65-83.
- Langenberg, Michael van. 1982. "Class and Ethnic Conflict in Indonesian's Decolonization Process: A Study of East Sumatra." *Indonesia* 33 (33):1-30.

- Netscher, Elisa. 1864. "Togtjes in het gebied van Riouw en onderhoorighede: Landschap op Deli." *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land,-en Volkenkunde* 19:340-51.
- Nienhuys, Jacobous. 1903. "De Vesteging der Tabakscultuur op Deli." *Indische Mercur*, Januari, 6.
- Pelly, Usman. 1984. *Sejarah Sosial Daerah Sumatra Utara Kotamadya Medan*. Jakarta: Depdikbud.
- _____. 1994. *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Pelzer, Karl. 1985. *Toeian Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Raet, J.A.M. van Cats Baron de. 1876. "Vergelijking van den vroegeren toestand van Deli, Serdang en Langkat met den tegenwoordigen." *Indische Land,- Taal,- en Volkenkunde* (23):20-39.
- Reid, Anthony. 1997. "Inside Out: The Colonial Displacement of Sumatra Population." Hlm.61-90, dalam *Paper Landscape, Exploration in the Environmental History of Indonesia*, disunting oleh Peter Boomgaard, Freek Colombijn, and David Hanley. Leiden: KITLV Press.
- Said, Mohammad. 1990. *Koeli Kontrak Tempo Doeloe: Dengan Derita dan Kemarahannya*. Medan: Penerbit Waspada Medan.
- Sinaga, Rosmaida, Lister Eva Simangunsong, dan Syarifah. 2020. *Kolonialisme dan Multikulturalisme Masyarakat Kota Medan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Straub, Dr. M. 1926. *Kindersterfte ter Oostkust van Sumatra*. Amsterdam: Uitgave van het Instituut.
- Stoler, Ann Laura. 1985. *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870-1979*. New Haven and London: Yale University Press.
- Thee Kian Wie. 1977. *Plantation Agriculture and Export Growth: An Economic History of East Sumatra, 1863-1942*. Jakarta: National Institute of Economic and Social Research.
- Turner, F.J. 1921. *The Frontier in America History*. New York: H. Holt & Co.
- Volker, T. 1928. *Van Oerbosch tot Cultuurgebied: een Schets van de Beteekenis van de Tabak, de Andere Cultures en de Industrie ter Oostkust van Sumatra*. Medan: Deli Planters Vereeniging.
- Waal, R. van de. 1959. "Richtlijnen voor een Ontwikkelings-plan voor de Oostkust van Sumatra." Disertasi, Wageningen Agricultural College.
- Wertheim, Wim. F. 1933. "Conditions on Sugar Estates in Colonial Java: Comparisons with Deli." *Journal of Southeast Asian Studies*, 24(2):268-84.

Westerman, Willem. 1901. *De
Tabakscultuur op Sumatra's
Oostkust*. Amsterdam: J.H. De
Bussy.

